

# Damai di Tahun Politik

FAISAL ZAINI DAHLAN

Dosen UIN Imam Bonjol Padang



Memang akan sulit menghindari eskalasi suhu politik yang semakin meninggi. Namun pada saat yang sama, amat diperlukan kesadaran individu dan komunal bahwa konflik sosial yang sangat berpotensi meletup dari pesta rakyat ini, sudah barang pasti akan menyengsarakan rakyat sendiri.

TAHUN politik 2018 baru saja dimulai. Sepanjang tahun ini serentetan peristiwa politik menjadi agenda utama. Selain pilkada serentak di sejumlah daerah, rangkaian pemilu legislatif seiring pilpres juga akan diawali. Kampanye pilkada dimulai Februari ini untuk selanjutnya pemungutan suara 27 Juni mendatang. Meski pileg dan pilpres baru dilaksanakan 17 April 2019, tetapi titik-titik krusial akan segera tiba. Penetapan parpol peserta pemilu, pengajuan calon legislatif dan calon presiden-wapres akan dilangsungkan berturut-turut sejak Februari hingga Agustus 2018. Artinya sepanjang tahun ini, riuh rendah politik akan menyesaki ruang publik.

## Antara Cemas dan Harapan

Hampir semua kalangan menaruh kekhawatiran menghadapi tahun politik ini. Presiden Jokowi ketika menerima para kepala suku di Istana Bogor November 2017, mewanti-wanti agar bangsa ini tidak berseteru dan tidak rukun karena perhelatan politik. Sementara mantan Presiden Megawati pada ulang tahunnya 23 Januari lalu menyebut bahwa tahun politik ini "kayaknya" menegangkan. Bawastu sendiri akan *concern* pada isu-isu SARA untukantisipasi, sekaligus membangun suasana damai. Menghadapi semua itu, rencananya bawastu akan mengumpulkan tokoh-tokoh lintas agama berbagai unsur.

Munculnya kecemasan dan kekhawatiran bisa dipahami mengingat intrik-intrik politik semakin sulit diprediksi. Di sisi lain, polarisasi terus mengerucut, menguat dan cenderung semakin terang benderang. Karenanya, hampir semua dinamika yang berlangsung sangat mudah ditarik-tarik kepada pembacauan politik. Apalagi pengaruh media yang amat signifikan khususnya medsos, menambah gonjang-ganjing sulit diverifikasi. Begitu pula respons masyarakat yang antusias di tengah tingkat melek politik yang beragam, mem-

buat tensi dan emosi cenderung dominan dibanding rasio.

Pengalaman pilkada DKI tahun lalu, sering dijadikan peta dalam membaca geliat politik di sejumlah daerah. Banyak pihak memprediksi isu SARA akan kembali mencuat sehingga politik identitas berdasar primordialisme menjadi signifikan. Karenanya, di satu sisi muncul anggapan adanya upaya pereduksian paradigma beragama yang terkesan mendangkalkan makna, memarginalkan fungsi, hingga memandulkan kharisma elit-elit untuk memutus relasi dan pengaruh agama yang begitu kuat terhadap politik.

Namun upaya ini justru dinilai akan semakin mengentalkan integrasi agama dan politik serta menambah suplai energi puritanisme bahkan fundamentalisme. Karenanya, upaya pengkambinghitaman agama sebagai peta demokrasi pada dasarnya hanya memantik fanatisme beragama dan menggiringnya ke tengah arena kontestasi terbuka. Ketika agama sebagai institusi paling vital sekaligus sensitif dihadap-hadapkan dengan kekuatan lain, maka wajah agama yang teduh damai akan sangat berpotensi menjadi garang dan radikal. Dalam konteks ini perlu dikaji ulang pembentukan opini dan persepsi yang dirasakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai pelecehan dan pendiskreditan agama.

Meski demikian, tahun politik

juga menjanjikan harapan munculnya kondisi yang lebih cerah. Jika masyarakat menilai terjadi carut marut dan amburadul yang makin *absurd*, maka legalitas penyelesaiannya antara lain melalui demokrasi ini. Di satu sisi publik pasti lebih *concern* soal-soal substantif yang bersentuhan langsung dengan kehidupan riil seperti peningkatan kesehatan, akses pendidikan, stabilitas harga, ketersediaan lapangan kerja, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, semua itu adalah produk politik putusan penentu kebijakan yang aktor-aktornya dipilih lewat pemilu. Karenanya, aspirasi publik untuk peningkatan taraf hidup sejatinya diperjuangkan melalui pesta demokrasi ini.

## Pesan Damai

Meski vital dan krusial tetapi pesta demokrasi ini bukanlah segalanya. Proses panjang yang tidak saja mendebarkan tetapi juga melelahkan, diselenggarakan demi mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi politik sebagai konsituen, masyarakat ikut menetapkan kebijakan untuk kepentingannya dengan mewakili aspirasinya kepada kontestan. Artinya, demokrasi bermuara pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Karena itulah kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan dan skala prioritas, di atas segala proses dan mekanisme, termasuk rangkaian pesta demokrasi itu sendiri.

Bagi kontestan yang berlaga, perhelatan demokrasi bisa saja berupa medan pertarungan menang kalah. Mahar politik yang ditengarai subur, menjadi momok yang menghantui apalagi jika kontestasi dipahami sebagai judi dan investasi. Karenanya digunakan beragam cara, bahkan menghalalkan segalanya. Namun bagi konsituen, sejatinya persoalan kesejahteraan bersama justru jauh lebih urgen dan vital. Dalam konteks inilah, kesadaran untuk tetap memelihara ketenangan, merawat kedamaian, dan menjaga keharmonisan, harus lebih prioritas karena secara langsung menyangkut hajat bersama.

Memang akan sulit menghindari eskalasi suhu politik yang semakin meninggi. Namun pada saat yang sama, amat diperlukan kesadaran individu dan komunal bahwa konflik sosial yang sangat berpotensi meletup dari pesta rakyat ini, sudah barang pasti akan menyengsarakan rakyat sendiri. Dengan demikian, terjaminnya suasana kondusif, aman, dan damai, sejatinya lebih menjadi *concern* dan komitmen masyarakat dibanding hiruk-pikuk perhelatan demokrasi itu sendiri.

Lagi pula, demokrasi hanyalah salah satu alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Eric Weiner, sebagaimana dikutip Yudi Latif (2018) menengarai bahwa tidak ada korelasi antara era keemasan kenegaraan dan demokrasi. Menurutnya, substansi yang perlu dihadirkan adalah kebebasan kreatif, bukan demokrasi semata. Ia mencontohkan China yang tidak demokratis, tetapi memiliki autokrat tercerahkan. Begitu pula Gubernur DIY yang tidak dipilih secara demokratis, namun wilayah ini tumbuh sebagai salah satu kota paling kreatif dan paling bahagia di Indonesia. Karena itu, amat keliru jika kedamaian yang sangat substantif justru diberangus demi sesuatu yang belum pasti menyejahterakan. *Wallahua'lam. (\*)*